

Anggota DPRD Kalsel Sebut Pancasila Mampu Cegah Radikalisme dan Konflik

written by Harakatuna



Harakatuna.com. Tanah Bumbu - Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhammad Yani Helmi atau yang akrab dengan sapaan Paman Yani berpendapat, Ideologi Pancasila mencegah radikalisme dan konflik.

Paman Yani mengemukakan pendapat itu melalui telepon seluler, usai melakukan sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila, Senin malam.

Oleh sebab itu, wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) tersebut merasa perlu menyosialisasikan Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila.

Paman Yani yang Wakil Ketua Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalsel itu menggarisbawahi yang dia maksud konflik seperti menjelang Pemilu Umum (Pemilu) Tahun 2024 berpotensi hal-hal yang bisa memecah belah bangsa manakala masyarakat kurang cerdas menyikapi.

Oleh sebab itu, dia mengingatkan agar masyarakat cerdas menyikapi hal-hal yang berpotensi konflik guna menjaga kestabilan dan keamanan.

“Jadi keyakinan kita terhadap Pancasila harus diperkuat. Bisa jadi radikalisme masuk tetapi masyarakat sudah dapat menangkalnya. Jangan sampai pula mau diadu domba apalagi mendekati Pemilu 2024 harus benar-benar tercipta perdamaian,” harapnya.

Karenanya pada kesempatan tersebut dia juga memberikan pemahaman terhadap bahaya radikalisme yang muncul tak hanya dari pendekatan secara personal melainkan pula melalui sosial media (medsos).

“Bijak-bijaklah bermedsos . Harus cerdas buat mencegah radikalisme dan konflik. Jaga persatuan dan kesatuan di Banua,” pesannya.

Ia juga berpesan, agar masyarakat, khususnya di Desa Hidayah Makmur, dapat ikut serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan. “Saya sudah berkeliling ke desa hingga kelurahan, dan berharap di Hidayah Makmur ini bisa terus menjaga keharmonisann,” demikian Paman Yani.

Sementara itu, Kasubbid Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu Badan Kesbangpol Kalsel, Harry Widhiyatmoko, mengatakan, menjaga persatuan dan kesatuan tidak hanya tugas pemerintah daerah hingga legislatif, melainkan juga tanggung jawab bersama dengan masyarakat.

“Kita harus bisa sama-sama menjaga toleransi. Berbeda tidak menjadi kita terpecah belah. Kewajiban secara personal harus dijaga. Terlebih, pengamalan serta implementasi empat pilar berbangsa dan bernegara benar-benar dijalankan,” ucapnya.

Selain itu, dia mengingatkan tak ada larangan berbeda pandangan atau pendapat. Namun, menjaga keharmonisan tanpa “bumbu-bumbui” konflik guna menjadikan kedamaian tercipta.